

URGENSI MENJAGA KEMAJEMUKAN DAN TOLERANSI DALAM ERA DEMOKRASI

Ridwan Sa'idi*

Abstrak

Kemajemukan dan keberagaman agama, budaya, suku, bahasa, dan adat istiadat menjadi ciri khas Indonesia dimata dunia. Nilai-nilai luhur ini perlu dijaga bersama dalam bingkai toleransi dan saling hormat menghormati. Dalam alam demokrasi di Indonesia menjaga kerukunan antar umat beragama dan masyarakat menjadi tanggungjawab semua pihak. Diperlukan kerjasama antar masyarakat dan pemerintah dalam melakukan upaya memelihara kerukunan umat beragama, pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan masyarakat. Konsepsi Bhineka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa harus dipahami secara utuh dan universal sehingga perbedaan dan kemajemukan yang ada dapat dikelola dengan baik dalam membangun bangsa dan negara.

Kata Kunci: Kemajemukan, Toleransi, Demokrasi.

Pendahuluan

Penduduk Indonesia terdiri atas berbagai kelompok masyarakat yang beragama, baik dari segi etnis, budaya, adat-istiadat maupun agama. Keragaman tersebut kita pandang sebagai aset kekayaan bangsa yang perlu disyukuri untuk dikelola secara bijak yang didasari sikap

*Dosen Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Megou Pak Tulang Bawang, mahasiswa S2 Pascasarjana FISIP Universitas Lampung.

kebersamaan sehingga tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Semboyan "*Bhineka Tunggal Ika*" sebagaimana telah dicetuskan oleh para pendiri negeri ini pada dasarnya mengingatkan sekaligus menanamkan tekad kepada kita bangsa Indonesia agar senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan walaupun terdiri atas berbagai suku, budaya maupun agama yang beragam. Sebaliknya, jika keragaman tersebut tidak dikelola secara baik maka kemungkinan timbulnya konflik antar kelompok yang berbeda merupakan suatu keniscayaan yang sulit dihindari.

Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kehidupan masyarakat modern yang demokratis adalah menampilkan sikap yang menghargai kemajemukan perbedaan suku, ras, etnis, budaya maupun agama. Masyarakat majemuk memiliki budaya dan aspirasi yang berbeda-beda satu sama lain tetapi memiliki kedudukan setara, tidak ada superioritas antar suku, ras, etnis, maupun agama. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik antar suku, ras, etnis budaya maupun agama apabila tidak disikapi secara baik. Hampir semua masyarakat yang berbudaya kini mengakui kemajemukan sosial tetapi kenyataannya masih timbul konflik-konflik.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke, kondisi ini memunculkan kemajemukan dalam sisi suku, ras, etnis, dan agama. Beberapa agama besar dunia tumbuh di negara Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Selain itu, tumbuh dan berkembang berbagai aliran dan kepercayaan lokal di sejumlah tempat yang tidak kalah banyak. Kemajemukan atau keanekaragaman agama yang tumbuh di negara Indonesia pada satu sisi menjadi modal kekayaan budaya sekaligus memberikan keuntungan karena dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk proses konsolidasi demokrasi. Tetapi pada sisi lain, apabila tidak disikapi secara baik keanekaragaman agama dapat berpotensi memicu konflik antar umat beragama yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks keanekaragaman agama di negara Indonesia tersebut, maka sikap

toleransi antar umat beragama untuk hidup berdampingan secara damai perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai elemen pemerintah maupun masyarakat.

Beberapa kajian ilmiah tentang kerukunan umat beragama dan toleransi pernah dilakukan oleh Achmad Sami'an¹ yang menyebutkan faktor pendorong terjadinya kerukunan antar karyawan yang beragama Islam dan Kristen di PT. Siwi adalah kesadaran yang bebas dari segala bentuk tekanan atau pengaruh, kondisi sosial, keagamaan, terjalin ketentraman dan kedamaian. Kajian Achmad Fauzi² menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kerukunan antar umat beragama dapat dilaksanakan melalui dialog, musyawarah bersama, gotong royong dalam bidang kemanusiaan serta kegiatan lainnya. Faktor yang mendukung kerukunan hidup antar umat beragama ialah toleransi dari semua pihak yang bersangkutan, serta konsep kerukunan hidup antar umat beragama Islam, Kristen, Konghucu ada sebuah benang merah yang dapat ditarik dan dijadikan landasan hidup rukun antar umat beragama yaitu sama-sama mengajarkan cinta, kasih sayang, dan penuh kedamaian sesama umat manusia dengan menggunakan landasan teori filsafat Pancasila dan jenis penelian deskriptif kualitatif.

Dalam membina keharmonisan hubungan dengan non-muslim dalam kehidupan bermasyarakat dipengaruhi oleh faktor keyakinan yang bersumber dari ajaran Islam sebagai dasar pemikirannya yakni adanya kesamaan asal usul manusia, hakekat perbedaan adalah sudah dikehendaki oleh Allah SWT. Beberapa peristiwa amuk massa di beberapa daerah di Indonesia, terlihat jelas pemicunya adalah perbedaan-perbedaan tersebut, dimana salah satunya adalah perbedaan

¹Achmad Sami'an. 2000. *Kerukunan Hidup Antar Beragama Islam dan Kristen di PT Siwi, Desa Tanjung Kecamatan Priyorejo, Kabupaten Gresik*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama IAIN Sunan Ampel Surabaya.

²Achmad Fauzi. 2006. *Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Gresik*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama IAIN Sunan Ampel Surabaya.

agama. Seperti kerusuhan di Lampung tahun 1989, kerusuhan di Makassar tahun 1997, kerusuhan di Ambon tahun 1998, di Poso serta beberapa daerah lainnya.³

Agama, secara universal mengajarkan nilai-nilai luhur seperti: menyayangi sesama, saling menghormati sesama dan saling menghargai. Aktualisasi terhadap nilai-nilai luhur tersebut dapat membuahkan perilaku yang toleran terhadap sesama apapun agamanya, sehingga dapat tercipta kerukunan antar-umat beragama. Sebaliknya, sikap beragama yang tidak toleran, yang mengembangkan anggapan bahwa hanya agamanya yang paling benar, sikap demikian dapat memicu timbulnya konflik antar-umat beragama. Di berbagai daerah di Indonesia yang penduduknya heterogen dari segi agama, kemungkinan rentan terhadap timbulnya konflik bernuansa agama akhir-akhir ini menunjukkan kecenderungan yang relatif kuat. Timbulnya berbagai konflik yang melibatkan antar kelompok umat beragama di beberapa daerah sejak dasawarsa terakhir, mengindikasikan kuatnya kemungkinan di atas.

Provinsi Lampung dengan 14 Kabupaten/Kota memiliki keaneka ragaman adat, budaya, suku, dan agama. Dengan kondisi masyarakatnya yang heterogen terkadang muncul konflik sosial di masyarakat yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang terkadang menjadi konflik SARA. Sebagai contoh konflik sosial di Kabupaten Tulang Bawang yang awalnya berlatarbelakang konflik lahan terkadang oleh oknum yang tidakbertanggungjawab dibawa menjadi konflik yang bermuatan unsur SARA. Tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana kerukunan umat beragama di Kabupaten Tulang Bawang di era demokrasi. Serta Bagaimanakah solusi terhadap penanganan konflik antar umat beragama di Kabupaten Tulang Bawang.

³Dadang Sudiadi. 2009. *Menuju Kehidupan Harmonis dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 5: Universitas Indonesia.

Demokrasi dalam Kemajemukan Masyarakat

Menurut Affan Gaffar dalam memaknai demokrasi setidaknya ada dua bentuk pemahaman yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik (demokrasi empirik). Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara.⁴ Sedangkan menurut Dede Rosyada demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.⁵ Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditata dan diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, yang menekankan bahwa kekuasaan tertinggi untuk membuat keputusan terletak di tangan seluruh rakyat, bukan berada di tangan beberapa atau salah satu dari orang tertentu.⁶

Definisi Demokrasi yang terkenal seperti diungkapkan *Abraham Lincoln* (dalam Sitepu, 2012) yang menyatakan bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan mengelaborasi gagasan tentang pemerintahan atau kekuasaan maknanya dapat diberikan dengan lebih tepat. Demokrasi adalah sistem politik dimana seluruh rakyat membuat dan berhak untuk membuat keputusan dasar mengenai soal-soal penting dalam kebijakan publik. Menurut *Huntington* (1995), suatu sistem politik dianggap demokratis apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dari sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Dalam sistem ini, para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Demokrasi juga

⁴Affan Gaffar. 2000. *Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁵Dede Rosyada, dkk. 2005. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hlm. 110-111

⁶Sunarso. 2013. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hlm. 182

mengimplikasikan adanya kebebasan sipil dan politik yaitu kebebasan untuk berbicara, menerbitkan, berkumpul dan berorganisasi, yang dibutuhkan bagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan.⁷

Menurut Robert Dahl ciri khas demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap preferensi atau keinginan warga negaranya. Tatahan politik seperti itu dapat digambarkan dalam dua dimensi teoritik: (1) seberapa tinggi tingkat kontestasi, kompetisi atau oposisi yang dimungkinkan; (2) seberapa banyak warga negara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik.⁸ Nurcholis Madjid menyebutkan demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Karena itu demokrasi harus diupayakan. Demokrasi dalam kerangka di atas berarti sebuah proses melaksanakan nilai-nilai *civility* (keadaban) dalam bernegara dan bermasyarakat. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga *civil society* yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi.⁹

John Sydenham Furnivall termasuk orang yang pertama kali menyebut Indonesia masuk ke dalam kategori masyarakat majemuk (*plural society*). Masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat di mana sistem nilai yang dianut berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya membuat mereka kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling

⁷Hertanto. 2005. *Teori-teori Politik Klasik dan Kontemporer*. Lampung: Universitas Lampung. Hlm. 128

⁸Ibid

⁹Sukron, Kamil. 2002. *Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Histories*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

memahami satu sama lain.¹⁰ Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok, yang tinggal bersama dalam suatu wilayah, tetapi terpisah menurut garis budaya masing-masing. Kemajemukan suatu masyarakat patut dilihat dari dua variabel yaitu kemajemukan budaya dan kemajemukan sosial. Kemajemukan budaya ditentukan oleh indikator-indikator genetik-sosial (ras, etnis, suku), budaya (kultur, nilai, kebiasaan), bahasa, agama, kasta, ataupun wilayah. Kemajemukan sosial ditentukan indikator-indikator seperti kelas, status, lembaga, ataupun *power*.¹¹

Pluralisme bangsa adalah pandangan yang mengakui adanya keragaman di dalam suatu bangsa, seperti yang ada di Indonesia. Istilah plural mengandung arti berjenis-jenis, tetapi pluralisme bukan berarti sekedar pangakuan terhadap hal tersebut. Namun mempunyai implikasi-implikasi politis, sosial, ekonomi. Oleh sebab itu, pluralism berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Banyak negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi tetapi tidak mengakui adanya pluralisme di dalam kehidupannya sehingga terjadi berbagai jenis segregasi. Pluralisme ternyata berkenaan dengan hak hidup kelompok-kelompok masyarakat yang ada dalam suatu komunitas. Komunitas-komunitas tersebut mempunyai budaya masing-masing dan keberadaan mereka diakui negara termasuk budayanya.¹²

Kemajemukan dalam konteks demokrasi dapat diwujudkan melalui adanya sikap toleransi. Toleransi yang dalam bahasa Inggris "*tolerance*" (*noun*), "*tolerate*" (*verb*), atau *tolerantia* dalam bahasa Latin bermakna *to allow or endure without protest*; *tolerance* bermakna

¹⁰Nasikun. 2006. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

¹¹Ibrahim Saad. 1981. *Competing Identities in a Plural Society*. Singapore: Institute Southeast Asian Studies.

¹²Hanum, Farida. ____ . *Pendidikan Multikultural dan Pluralisme Bangsa*. Makalah. Hlm. 2.

*quality of tolerating opinions, beliefs, customs, behaviors.*¹³ Dalam bahasa Arab, istilah toleran merujuk kepada kata *tasamuh* atau *tasahul*. Namun konsep *tasamuh* dalam wacana keislaman tidak semata-mata terbatas toleran karena *tasamuh* mengandung arti “memberi” dan “mengambil”. Orang Islam disebut *mutasamih* manakala ia bersikap pemurah, pemaaf, serta penerima atas keadaan orang lain.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, toleran dijelaskan sebagai “*kelapang-dadaan*” dalam arti suka kepada siapapun, membiarkan orang lain berpedirian atau berpendapat lain, tak mengganggu kebebasan berpikir dan keyakinan orang lain.¹⁴ Sullivan, Pierenson dan Marcus mendefinisikan toleran sebagai “*a willingness to put up with those things one rejects or opposes*”, yakni kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk menerima, menghargai, atau menghormati segala sesuatu yang ditolak atau ditentang oleh seseorang karena adanya perbedaan.¹⁵ Dalam penelitian ini, yang dimaksud toleransi dalam konteks keberagaman—berdasarkan varian pemaknaan di atas adalah: sikap keterbukaan untuk mendengar, memahami pandangan yang berbeda, menerima kenyataan perbedaan dengan segala implikasinya, serta tidak merusak prinsip dan aktualisasi agama oleh setiap pemeluk yang berbeda dalam batas ruang lingkup yang dapat diterima secara teologis dan sosial”.¹⁶

¹³A.S. Hornby. 1995. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. New York: Oxford University Press.

¹⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1995. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta.

¹⁵Arthur O'Sullivan. 2003. *Urban Economics, Mc Graw Hill*. Bandung: Elvira.

¹⁶Basori Abdul H. 2012. *Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tulang Bawang*. Jurnal Multikultural dan Multireligious Vol. 11. Tulang Bawang.

Mewujudkan Tulang Bawang yang Rukun dan Damai

Kabupaten Tulang Bawang secara geografis terletak di bagian utara wilayah Provinsi Lampung, berada di posisi 105°09' s/d 105°55' arah Timur-Barat dan 04°08' s/d 04°41' arah Utara-Selatan. Batas-batas wilayahnya, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mesuji, sebelah Selatan dengan Kabupaten Lampung Tengah, sebelah Timur dengan Laut Jawa dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat (BPS Kabupaten Tulang Bawang, 2016). Dilihat dari kondisi tanahnya, wilayah Kabupaten Tulang Bawang dapat dibagi menjadi 4 (empat) unit topografi, yaitu: (1) daerah dataran, yang merupakan daerah terluas dan sebagian besar dimanfaatkan untuk areal pertanian dan cadangan pengembangan transmigrasi; (2) daerah rawa, terdapat di sepanjang pantai Timur dimanfaatkan untuk perawatan pasang surut; (3) daerah River Basin, terdapat dua River Basin utama, yaitu River Basin Tulang Bawang dan River Basin sungai-sungai kecil lainnya. Areal River Basin Tulang Bawang dengan anak-anak sungainya, sebagian dipergunakan untuk pengembangan tambak udang; dan 4 (empat) daerah alluvial, meliputi pantai sebelah Timur yang merupakan bagian hilir sungai-sungai besar Tulang Bawang dan Mesuji, dimanfaatkan untuk pelabuhan.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tulang Bawang merupakan daerah agraris, sehingga memiliki potensi yang tinggi bagi sektor pertanian. Di samping itu, kabupatn ini tergolong kaya bahan tambang (endapan mineral) yang belum banyak ditemukan sehingga potensi endapan bahan tambang belum banyak diketahui. Dari data peta geologi wilayah Tulang Bawang diinventarisir adanya bahan-bahan tambang, di antaranya : minyak bumi di daerah sekitar Menggala, batubara muda di bagian hulu Way Tulang Bawang dan pasir kuarsa terdapat di sekitar Menggala.¹⁷

Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang secara umum memiliki keragaman yang tinggi. Dimulai dari tingkat persebaran etnis,

¹⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang. 2016.

Ridwan Sa'idi: URGENSI MENJAGA KEMAJEMUKAN.....

pekerjaan, maupun pemeluk agama. Hal ini menjadi warna tersendiri bagi pembangunan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang itu sendiri. Pembangunan masyarakat yang tidak lagi melihat atau memandang perbedaan terhadap hal-hal yang menjadi identitas bagi setiap masyarakat yang ada. Maka wajar apabila masyarakat Kabupaten Tulang Bawang sendiri sangat jauh dari pertikaian atau konflik yang berdasarkan pergesekan kelompok, etnis atau agama. Karena tingkat kesadaran akan toleransi inilah maka masyarakat Kabupaten Tulang Bawang dapat terus melanjutkan atau menjalani kehidupan sehari-hari tanpa dibayangi rasa takut atau kekhawatiran akan terjadinya konflik yang bersifat SARA. Berikut ini data tentang potensi konflik antar warga di Kabupaten Tulang Bawang.

Tabel 1. Daerah Berpotensi Konflik Antar Warga di Kabupaten Tulang Bawang

No	Kecamatan	Konflik				
		Sosial	Politik	Ekonomi	Budaya	Ideologi
1	Banjar Agung	1	-	1	1	1
2	Banjar Margo	1	-	1	2	-
3	Gedung Aji	1	-	-	2	1
4	Penawar Aji	1	1	1	1	-
5	Meraksa Aji	2	-	-	1	-
6	Menggala	1	-	2	1	1
7	Penawar Tama	1	-	1	-	1
8	Rawajitu Selatan	2	1	1	1	1
9	Gedung Meneng	2	-	-	-	1
10	Rawajitu Timur	1	-	1	2	-
11	Rawa Pitu	1	-	1	1	1
12	Gedung Aji Baru	2	1	-	2	-
13	Dente Teladas	3	-	1	-	1
14	Banjar Baru	1	1	-	1	-
15	Menggala Timur	1	-	1	1	-
Jumlah Kelurahan/Kampung		21	4	11	16	8

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang, 2017.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bagaimana berbagai potensi konflik yang dimungkinkan terjadi di Kabupaten Tulang

Ridwan Sa'idi: URGENSI MENJAGA KEMAJEMUKAN.....

Bawang. Dimana secara garis besar merupakan konflik yang terjadi antar kelompok. Setidaknya kondisi inilah yang menjadi rujukan bagaimana melihat hubungan kemasyarakatan antar kelompok-kelompok yang memiliki latar belakang sosio-kultural yang berbeda. Konflik sosial yang terjadi di Indonesia dalam beberapa dekade belakangan ini berkisar pada konflik sosial dengan segala akibatnya. Konflik sosial baik secara vertikal maupun horisontal terjadi di semua wilayah, termasuk di Kabupaten Tulang Bawang. Karakteristik konflik sosial yang terjadi dipicu beberapa persoalan. Antara lain yang berkenaan dengan politik seperti pemilu, pilkada atau pemilihan kepala desa. Dibidang ekonomi seperti perebutan lahan antar warga dengan perusahaan dan pembukaan lahan kawasan hutan lindung untuk perkebunan oleh warga. Selain itu di beberapa daerah isu lokal seperti pemekaran wilayah juga telah menjadi bagian dari persoalan yang mengakibatkan terjadinya konflik.

Dalam sebaran agama yang di anut oleh masyarakat Tulang Bawang terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah Pemeluk Agama Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016

No	Kecamatan	Agama				
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha
1	Banjar Agung	30.083	323	235	1.134	12
2	Banjar Margo	26.451	2.355	462	146	42
3	Gedung Aji	11.353	342	272	244	34
4	Penawar Aji	17.823	232	254	241	125
5	Meraksa Aji	11.982	1.325	825	255	187
6	Menggala	32.403	534	375	1.356	675
7	Penawar Tama	25.852	345	357	443	353
8	Rawajitu Selatan	27.000	533	523	342	65
9	Gedung Meneng	25.284	1.245	357	657	34
10	Rawajitu Timur	29.198	234	547	1.754	23
11	Rawa Pitu	14.644	111	578	975	35
12	Gedung Aji Baru	18.784	167	684	523	76
13	Dente Teladas	45.032	466	233	1.024	456
14	Banjar Baru	11.684	278	864	253	45
15	Menggala Timur	20.697	201	235	167	24

Ridwan Sa'idi: URGENSI MENJAGA KEMAJEMUKAN.....

JUMLAH	348.270	8.691	6.801	9.514	2.186
---------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Sumber: Seksi Pemerintahan Kantor Kecamatan Menggala, 2017.

Tabel tersebut di atas menunjukkan tingkat keragaman pemeluk agama yang berbeda, dimana komunitas muslim menjadi mayoritas secara kuantitas. Disusul oleh komunitas pemeluk Agama Kristen Protestan. Namun keberadaan keberagaman memeluk agama, ternyata tidak mempengaruhi bagaimana pola interaksi yang muncul diantara komunitas agama yang satu dengan yang lain. Hal ini dibuktikan dimana masyarakat dapat bersama-sama hidup bermasyarakat dalam satu wilayah. Pola hubungan antar umat beragama inilah yang setidaknya menjamin bagaimana tingkat toleransi yang terjadi antar masyarakat menjadi hal yang sudah sangat biasa dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang. Apalagi di beberapa wilayah, sering kita temui bagaimana bangunan tempat ibadah seperti gereja dan masjid terletak secara berhadapan.

Beragamnya suku, adat-istiadat dan budaya serta agama yang dipeluk penduduk Kabupaten Tulang Bawang pada dasarnya secara signifikan tidak berpengaruh bagi terciptanya hubungan yang harmonis di kalangan masyarakat. Masing-masing suku dapat mengekspresikan adat-istiadat dan budaya masing-masing tanpa ada halangan dari kelompok suku lain. Demikian pula dalam hidup beragama baik di kalangan internal maupun antarumat beragama, masing-masing kelompok agama dapat mengaktualisasikan ajaran agama secara leluasa sesuai yang mereka yakini tanpa ada keberatan dari kelompok agama lain (Hakim, 2012:165).¹⁸

Konflik di kalangan umat beragama di daerah ini dapat terjadi apabila masyarakat mengesampingkan nilai-nilai budaya setempat, tidak menghargai kearifan lokal terutama oleh para pendatang dengan

¹⁸Basori Abdul H. 2012. *Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tulang Bawang*. Jurnal Multikultural dan Multireligious Vol. 11. Tulang Bawang. Hlm. 165

mengedepankan budaya sendiri, serta pendirian rumah ibadah yang tidak mengindahkan kondisi lingkungan serta peraturan yang ada. Sebaliknya integrasi dapat tercipta jika tetap menjaga kearifan lokal, hubungan kekerabatan di kalangan sebagian masyarakat yang berbeda agama, adanya budaya saling berkhujung, saling menghargai, hormat-menghormati antar sesama, serta peran para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama serta aparat pemda yang secara proaktif menjaga kerukunan hidup beragama. Umat beragama di Tulang Bawang pada umumnya saling pengertian dan saling menghormati terhadap umat beragama lain yang melakukan kegiatan keagamaan. Toleransi antar-umat beragama tercipta dalam kehidupan bergama masyarakat. Dengan demikian hubungan antar umat beragama terlihat kondusif, bersatu, dan terbentuk kerjasama dalam kehidupan sosial. Kesetaraan dalam bermasyarakat terlihat dengan tidak adanya dominasi kelompok agama mayoritas terhadap kelompok agama minoritas (Hakim, 2012)¹⁹

Keberadaan para pendatang dari berbagai daerah yang pada umumnya melalui program transmigrasi yang menjadi penduduk Kabupaten Tulang Bawang, menjadikan daerah Tulang Bawang dihuni oleh penduduk dengan latar belakang agama yang beragam. Sikap keterbukaan, toleransi dan sikap kebersamaan masyarakat maupun aparat pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang terhadap pendatang, menjadikan hubungan antar umat beragama di daerah ini kondusif. Sementara itu, berfungsinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal penduduk Tulang Bawang dalam kehidupan bermasyarakat, ikut berperan dalam penciptaan kehidupan umat beragama yang rukun. Sikap keterbukaan para pendatang yang menjadikan mereka mudah beradaptasi dengan masyarakat asli Tulang Bawang/Lampung juga merupakan aspek yang tidak dapat dikesampingkan dalam penciptaan kehidupan umat beragama yang kondusif di Tulang Bawang.

Dalam beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) Tulang Bawang kerap

¹⁹*Ibid*

mengadakan dialog antar umat beragama. Salah satunya pada saat mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Bupati Tulang Bawang Hanan A. Razak yang sekaligus memberikan sambutan, yang dilaksanakan di aula kantor pemerintahan setempat (harianlampung.com).²⁰ Hal tersebut menandakan bahwa para tokoh lintas agama dan pemerintah bersinergi untuk menciptakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Sampai saat ini situasi dan kondisi antar umat beragama di Tulang Bawang relative aman dan kondusif. Kegiatan yang lain diantaranya, pada saat pergantian tahun 2016 ke 2017, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mengadakan Doa bersama dengan Lintas Agama. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mengajak masyarakat untuk memaknai pergantian tahun dengan melakukan hal-hal positif yang pada akhirnya diharapkan dapat membawa kesejahteraan dan kerukunan antar umat beragama yang ada di kabupaten Tulang Bawang.

Model dialog keagamaan yang ditawarkan antara lain seperti yang dikemukakan oleh Kimball: Pertama, dialog Parlementer (*Parliamentary Dialogue*). Dialog ini dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh umat beragama di tingkat dunia. Misalnya dengan telah dibentuk dan dilakukannya *World's Parliament of Religions* dan *Confrence on Religions and Peace*, dan *The World Congress of Faiths*. Tujuannya adalah mengembangkan kerjasama dan perdamaian di antara umat beragama di dunia. Kedua, dialog Kelembagaan (*Institutional Dialogue*). Dialog ini dilakukan dengan melibatkan organisasi-organisasi keagamaan. Tujuannya mendiskusikan dan memecahkan persoalan keumatan dan mengembangkan komunikasi di antara organisasi keagamaan (PGI, Walubi, KWI, Parisadha Hindu Dharma, MUI, dan lain-lain). Ketiga, dialog Teologi (*Theological Dialogue*). Tujuan dilakukannya dialog model ini adalah untuk membahas

²⁰[Http://Harianlampung.Com/Index.Php?K=Kawasan&I=12152-Tulangbawang-Tingkat-Kerukunan-Umat-Beragama](http://Harianlampung.Com/Index.Php?K=Kawasan&I=12152-Tulangbawang-Tingkat-Kerukunan-Umat-Beragama) di unduh pada tanggal 5 Mei 2017.

persoalan-persoalan teologis-filosofis. Dialog ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep teologis masing-masing agama. Berusaha membangun pemahaman sesuai dengan yang dikehendaki oleh suatu agama tertentu dan menghindari pemahaman yang bersifat subjektif. Keempat, dialog dalam Masyarakat (*Dialogue in Community*). Dialog ini dilakukan dengan cara atau dalam bentuk kerjasama dari komunitas agama yang plural dalam menggarap dan menyelesaikan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, dialog Kerohanian (*Spiritual Dialogue*). Dialog model ini dilakukan dengan tujuan mengembangkan dan memperdalam kehidupan spiritual di antara berbagai agama.²¹

Penutup

Seperti telah disinggung di atas, untuk mencairkan kebekuan yang terjadi antar umat beragama, alternatif yang bisa dikemukakan adalah dengan mekanisme dialog keagamaan atau yang dikenal pula dengan istilah dialog antar iman. Dialog antar umat beragama ini diperkirakan bisa mengantarkan para pemeluk agama pada satu corak kehidupan yang inklusif dan terbuka. Dialog diharapkan akan membawa umat beragama pada konsep '*unity in diversity*' dan '*to life together*' dengan didasari corak pemikiran teologi pluralitas. Model-model dialog di atas kiranya dapat menjadi solusi alternatif sebagai sarana yang bisa digunakan untuk membangun keharmonisan hidup di antara umat beragama. Melalui dialog itu akan berkembang model pemahaman keagamaan yang tidak semata menegaskan perbedaan, melainkan juga mencari titik temu atau persamaan-persamaan yang ada di antara agama-gama itu. Dialog antar iman ini diharapkan akan mengantarkan umat beragama dari paradigma 'kesalehan ritual' dan 'kesalehan individual' kepada bentuk 'kesalehan sosial'.

²¹Ismail S, D.Partha. 1999. *Social Capital A Multifaceted Perspective*. Washington DC: The World Bank.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa umat beragama di Kabupaten Tulang Bawang pada umumnya saling pengertian dan saling menghormati terhadap umat beragama lain yang melakukan kegiatan keagamaan. Toleransi antar-umat beragama tercipta dalam kehidupan beragama masyarakat. Dengan demikian hubungan antar umat beragama terlihat kondusif, bersatu, dan terbentuk kerjasama dalam kehidupan sosial. Kesetaraan dalam bermasyarakat terlihat dengan tidak adanya dominasi kelompok agama mayoritas terhadap kelompok agama minoritas. Solusi alternatif untuk penanganan konflik keagamaan dan sosial dapat dilakukan melalui dialog-dialog keumatan dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Daftar Pustaka

- Abdul H., Basori. 2012. *Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tulang Bawang*. Jurnal Multikultural dan Multireligious Vol. 11. Tulang Bawang.
- Dadang Sudiadi. 2009. *Menuju Kehidupan Harmonis dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 5: Universitas Indonesia.
- Dede Rosyada, dkk. 2005. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Fauzi, Achmad. 2006. *Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Gresik*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Gaffar, Affan. 2000. *Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hanum, Farida. ____ . *Pendidikan Multikultural dan Pluralisme Bangsa*. Makalah.

- Hertanto. 2005. *Teori-teori Politik Klasik dan Kontemporer*. Lampung: Universitas Lampung.
- Hornby, A. S.1995. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. New York: Oxford University Press.
- [Http://Harianlampung.Com/Index.Php?K=Kawasan&I=12152-Tulangbawang-Tingkat-Kerukunan-Umat-Beragama](http://Harianlampung.Com/Index.Php?K=Kawasan&I=12152-Tulangbawang-Tingkat-Kerukunan-Umat-Beragama) di unduh pada tanggal 5 Mei 2017.
- Ibrahim Saad. 1981. *Competing Identities in a Plural Society*. Singapore: Institute Southeast Asian Studies.
- Kamil, Sukron. 2002. *Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptul dan Histories*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Nasikun. 2006. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- O'Sullivan, Arthur. 2003. *Urban Economics, Mc Graw Hill*. Bandung: Elvira
- Partha, D., Ismail S. 1999. *Social Capital A Multifaceted Perspective*. Washington DC: The World Bank.
- Sami'an, Achmad. 2000. *Kerukunan Hidup Antar Beragama Islam dan Kristen di PT Siwi, Desa Tanjung Kecamatan Priyorejo, Kabupaten Gresik*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama IAIN Sunan Ampel Surabaya .
- Sitepu, Anthonius. 2012. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sunarso. 2013. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.